

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA
(SKPK) KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH

**R. MUHAMMAD WAHIDIN KUNTARA
NPM 2102110044**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 03 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

R. MUHAMMAD WAHIDIN KUNTARA
NPM. 2102110044

Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK) KOTA BANDA ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si.Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Eva Susanti, SE, M.Si.Ak, CA
NIK. 1760202 200607 2 001

Pembimbing II

Rusnaldi, SE, M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan



Drs. N. Tazuliz Gadeng, SE, M.Si. MM
NIK. 19700408 199401 1 001



Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 03 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

R. MUHAMMAD WAHIDIN KUNTARA
NPM. 2102110044

Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK) KOTA BANDA ACEH**

yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 03 Februari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si. MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Rusnaldi, SE, M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Emmi Suryani Nst, SE, M.Si
NIK. 19800301 200610 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 03 Februari 2024
Yang Menyatakan



R. MUHAMMAD WAHIDIN KUNTARA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : R. Muhammad Wahidin Kuntara
NPM : 2102110044
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK) KOTA BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Februari 2024

Banda Aceh, 03 Februari 2024
Yang Menyatakan



R. Muhammad Wahidin Kuntara

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamulaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul “ ***Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh***”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam hal penyampaian bahasa, kata maupun dalam hal penyajian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan maupun isi dari skripsi ini dan memohon dengan berbesar hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus hati, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan ikhlas dan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si selaku Ketua Laboratorium Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Eva Susanti S.E., M.Si., Ak dan Bapak Rusnaidi, S.E.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan dorongan penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Dosen, staf pengajar, dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman penulis di Kantor Perwakilan BPKP Aceh yang telah mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis di dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Februari 2024

R. Muhammad Wahidin Kuntara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teoritis	10
2.2 Penelitian Sebelumnya	24
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
1.5 Desain Penelitian	30
2.5 Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
4.5 Definisi dan Operasionalisasi variabel	34
5.5 Teknik Analisis Data.....	37
6.5 Pengujian Data.....	39
7.5 Pengujian Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	43
4.2.1 Karakteristik Responden	43
4.2.2 Hasil Deskripsi Variabel Penelitian	44
4.3 Hasil Pengujian Data	49
4.3.1 Uji Validitas	49
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	51
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	52
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	52
4.4.2 Uji Hipotesis.....	53

4.5	Pembahasan	58
4.5.1	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Secara Simultan terhadap Kualitaas Laporan Keuangan.....	58
4.5.2	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	58
4.5.3	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan	59
4.5.4	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan	60
4.6	Implikasi Hasil Penelitian	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Opini LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2011-2021	5
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	32
Tabel 3.2	Skala Pengukuran.....	34
Tabel 3.3	Definisi dan Operasional Variabel	35
Tabel 4.1	Daftar SKPK Kota Banda Aceh	41
Tabel 4.2	Karakteristik Responden	43
Tabel 4.3	Gambaran Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan.....	44
Tabel 4.4	Gambaran Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	46
Tabel 4.5	Gambaran Variabel Sistem Pengendalian Intern	47
Tabel 4.6	Gambaran Variabel Kualitas Laporan Keuangan	48
Tabel 4.7	Ringkasan Hasil Uji Validitas.....	49
Tabel 4.8	Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas.....	51
Tabel 4.9	Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.10	Hasil Uji Determinasi R ²	53
Tabel 4.11	Hasil Uji Signifikansi F.....	54
Tabel 4.12	Hasil Uji Signifikansi t.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	31
------------	-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Data Mentah Penelitian
Lampiran 3	Uji Validitas
Lampiran 4	Uji Reliabilitas
Lampiran 5	Analisis Regresi Linear berganda
Lampiran 6	Surat Penelitian

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA
PEMERINTAH KOTA (SKPK) KOTA BANDA ACEH**

**R MUHAMMAD WAHIDIN KUNTARA
NPM: 2102110044**

Pembimbing I: Eva Susanti, SE., M.Si., Ak., CA

Pembimbing II: Rusnaidi, SE., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) Kota Banda Aceh. Pemilihan sampling menggunakan metode sampling jenuh yang menghasilkan sampel sebanyak 88 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda dengan Tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel berikut: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Nilai Determinasi R^2 adalah sebesar 0,224 atau kemampuan ketiga variabel untuk menjelaskan kualitas laporan keuangan sebesar 22,40% sedangkan sisanya sebesar 77,60% dijelaskan oleh variabel lain. Implikasi hasil penelitian yaitu Penerpaan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Pemerintah

THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM, THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY, AND THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS ON SKPK KOTA BANDA ACEH

R MUHAMMAD WAHIDIN KUNTARA
NPM: 2102110044

Supervisor I: Eva Susanti, SE., M.Si., Ak., CA
Supervisor II: Rusnaldi, SE., M.Si

ABSTRACT

The purpose of the research is to examine the influence of The Implementation of Government Accounting Standards, The Utilization of Information Technology, and The Government Internal Control System on The Quality of Regional Government Financial Statements on SKPK Kota Banda Aceh. The sampling technique is saturation sampling which consist of 88 people. The data analysis method this research used is multiples linear regression analysis with a 5% of significance level. The results of this research shows these following variables: the implementation of government accounting system, the utilization of information technology, and the government internal control system simultaneously take effect on the quality of regional government financial statements. The implementation of government accounting system partially has a positive and significant effect on the quality of regional government financial statements. The utilization of information technology partially has a positive and significant effect on the quality of regional government financial statements. The government internal control system partially has a positive and significant effect on the quality of regional government financial statements. The R-squared score is 0,224 or the ability of those three variables to explain the quality of regional government financial statements equals to 22,40%, while the remaining 77.60% is explained by other variables. The implication of the research is that the influence of The Implementation of Government Accounting Standards, The Utilization of Information Technology and The Government Internal Control Systems results in increasing the quality of financial statements.

Keywords: Government Accounting Standards, Information Technology, The Government Internal Control System

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang - barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor privat. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004).

Organisasi sektor publik sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang kepemilikannya berada di tangan pemerintah, serta bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya (Nurillah, 2014).

Saat ini, paradigma pemerintahan di berbagai Negara bergeser menuju ke tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam rangka menempatkan administrasi pemerintahan menjadi lebih berhasil guna, berdayaguna, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Aparat pemerintahan berubah menjadi tanggap akan tuntutan lingkungannya, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas.

Sejalan dengan paradigma tersebut, hal tersebut berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah

daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas (Sudiarianti, dkk 2015).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjadi suatu wujud konkrit bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat (1) dinyatakan bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan negara. LKPD tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, penilaian kinerja pemerintah, dan sebagai alat pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus berkualitas dan dapat dipahami oleh pengguna sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi gambaran

tentang kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut dalam satu periode akuntansi. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) salah satunya adalah pemerintah pusat, dan pemerintahan daerah adalah entitas pelaporan yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas yang bersifat “vertikal” (pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat), selain itu LKPD juga merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah secara “horizontal” (pertanggung jawaban kepada masyarakat). Untuk itu pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan demikian pengguna laporan keuangan tersebut dapat memperoleh informasi yang berkualitas serta bermanfaat.

Laporan keuangan adalah *output* yang dihasilkan dari disiplin ilmu akuntansi. Pada era yang modern seperti saat ini, penyusunan laporan keuangan juga dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Seiring perkembangan zaman, teknologi di pandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya (Nurillah, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah pemerintahan daerah untuk menyusun LKPD, selain itu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan tepat waktu.

Keharusan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, serta di dukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas sebuah laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari beberapa unsur:

- a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan Laporan Keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Untary dan Ardiyanto, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga

negara yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam hal ini BPK memberikan 4 (empat) macam opini audit yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) Dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal setelah itu laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2011-2021

Entitas Pemerintah Daerah	Opini										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Banda Aceh	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: www.bpk.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh, dapat dilihat bahwa Kota Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 secara berturut-turut. Hasil ini tentunya sangat baik, dan keberhasilan ini menjadikan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi satu-satunya kota maupun kabupaten di Provinsi Aceh yang berhasil meraih predikat opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Aceh terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 ditemukan bahwa terdapat permasalahan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan permasalahan ketidakpatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan total nilai sebesar Rp152,694 Miliar.

Selain itu, adanya kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam pengadaan lahan tempat Zikir Nurul Arafah Islamic Center (aceh.antaranews.com) menjadi perhatian tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian. Masa tahanan Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh selaku tersangka korupsi pengadaan lahan zikir Nurul Arafah Islamic Center telah habis per 5 Desember 2023. Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh telah ditahan selama 120 hari sejak tanggal Agustus hingga 5 Desember 2023, sembari penyidik merampungkan berkas perkaranya untuk dapat disidangkan. Meski masa tahanannya habis, polisi masih terus melanjutkan perkara yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1 Miliar (berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh).

Penelitian mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah banyak dilakukan, tetapi masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil Penelitian Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil yang berbeda dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan Inapty, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian Untary dan Ardiyanto (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yensi, dkk

(2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian variabel pemahaman teknologi informasi juga dapat terlihat pada hasil penelitian Yosefrinaldi (2013) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dengan judul ***“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Kota Banda Aceh”***.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menghasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh?

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi, berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh secara simultan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh secara parsial.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh secara Parsial.
4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengetahui hubungan pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan, dan tambahan sumbangan pengetahuan yang lebih luas sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terletak pada pengujian pengaruh variabel pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kota Banda Aceh.

Bab ini telah menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Semua pemaparan ini akan mendukung pemaparan untuk bab selanjutnya. Pemaparan selanjutnya akan membahas terkait dengan landasan teoritis, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness Theory*)

Teori kegunaan keputusan pada informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan para pembuat informasi akuntansi yang bertugas menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan ekonomi yang baik. Pihak yang berkepentingan dalam arti para pengguna/pemakai laporan keuangan (Staubus, 2000 dalam Endang, 2011).

Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya komponen seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan yang memadai, sumber daya manusia yang berkompeten, pemanfaatan teknologi yang mendukung, sistem pengendalian internal yang baik dan *good governance*, maka kualitas laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi akan semakin baik sehingga mencakup sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi nilai relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna/pemakai informasi tersebut.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan adalah apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu penyajian laporan keuangan disajikan dengan keadaan sebenarnya bebas dari kata menyesatkan, bersifat netral. Dapat dibandingkan antar periode ataupun antar entitas. Kemudian dapat dipahami yaitu dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan sektor publik pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD setidaknya meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan Arus Kas (LAK), dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penggunamembuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability and stewardship*).

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (*managerial and control*).

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam menilai keakuntabilitasan dan membuat keputusan baik secara ekonomi, social maupun politik. Oleh karena itu, maka laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya keuangan/ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi LKPD sehingga bisa dikatakan berkualitas yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masalalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik yang terdiri dari :

- a. Memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.

b. Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.

c. Disajikan tepat waktu (*timeliness*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal (*Reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yang terdiri dari :

a. Penyajian jujur (*faithfulness of presentation*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadi perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Dalam teori kegunaan-keputusan (*Decision-Usefulness Theory*) menjelaskan pentingnya komponen-komponen tersebut yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji laporan keuangan agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Transparansi laporan keuangan akan memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas menyajikan informasi yang jujur dan benar bagi pengguna laporan keuangan. Informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan harus dipersiapkan dengan baik, dan sudah disetujui audit secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan yang berkualitas beban, asset hutang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sementara itu, standar akuntansi pemerintah basis kas menuju akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Standar Akuntansi

Pemerintahan memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan. (Halim, 2012: 244).

Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk meningkatkan keterbandingan (*comparability*) antar laporan keuangan pemerintah. Namun, tidak hanya itu, dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga Indonesia dapat bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Menurut Afiah (2009:27) Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terutama mengatur mengenai tiga hal, yang terdiri dari:

1. Pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang

terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

2. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
3. Pengungkapan. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
2. Nilai Historis (*Historical Cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan nilai historis lebih dapat

diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*). Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*). Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan, sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
5. Periodisitas (*Periodicity*). Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
6. Konsistensi (*Consistency*). Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru

diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*). Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*). Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa, untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Indriasari, Nahartyo, 2008). Saat ini telah dikenal istilah *E-Government (E-Gov)*,

pemerintah digital, *online* pemerintah atau pemerintah transformasi. Melalui penerapan *E-Gov* pemerintah dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat, unit bisnis, pegawai, *stakeholder*, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Ada tiga model penyampaian *E-Government*, antara lain:

1. *Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)*

Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : Pajak *online*, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspur, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

2. *Government-to-Business (G2B)*

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem *e-procurement*. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dan lain-lain.

3. *Government-to-Government (G2G)*

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi,

Contoh: Konsultasi secara *online*, *blogging* untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPI adalah untuk menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya: a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; b. keandalan Laporan Keuangan; c. pengamanan aset negara; dan d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran

aparatus pengawasan intern pemerintah yang efektif; h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah; dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang

diharapkan.

Kegiatan pengendalian sebagaimana terdiri atas: a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. Pembinaan sumber daya manusia; c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. Pengendalian fisik atas asset; e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. Pemisahan fungsi; g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan

berkelanjutandiselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisahdiselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal, yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terhadap variabel pemahaman teknologi informasi dapat terlihat pada hasil penelitian Yosefrinaldi (2013) dengan judul Pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram. Hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian Sari, dkk (2014) dengan judul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Jembaran), menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian oleh Yensi, dkk (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupatean Kuantan Singingi),

menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Untary dan Ardiyanto (2015) dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Inapty, dkk (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris Pada Dinas Pengelolaan	Metode Analisis data: Regresi Linear Berganda	Kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh	• Variabel Independen menggunakan Kapasitas SDM, dan pemanfaatan Teknologi Informasi • Variabel Dependen menggunakan	• Variabel Independen tidak menggunakan Kapasitas Sumber Daya Manusia • Objek dan Tahun

	Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat. Yosefrinaldi, (2013)		positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemda	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian
--	--	--	--	---	------------

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Jemberan). Sari, dkk (2014)	Metode Analisis data: Regresi Linear Berganda	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	• Variabel Independen menggunakan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). • Variabel Dependen menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Objek penelitian dan tahun penelitian
3	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi) Yensi, Dkk (2014)	Metode Analisis data: Regresi Linear Berganda	Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern (internal audit) tidak mempengaruhi kualitas	• Variabel Independen menggunakan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern • Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	• Variabel independent menggunakan sumber daya manusia • Objek penelitian dan tahun penelitian

			keuangan pemerintah daerah.		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Lanjutan Tabel 2.1

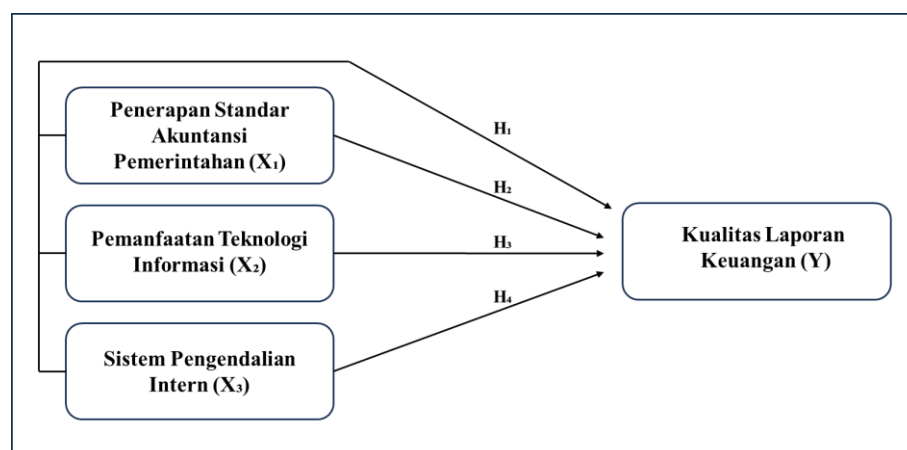
No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang) Untary dan Ardiyanto, (2015)	Metode Analisis data: Regresi Linear Berganda	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	• Variabel Independen menggunakan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia • Variabel Dependen menggunakan Kualitas Laporan Keuangan	• Tidak menggunakan variabel moderasi Objek dan tahun penelitian
5	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Inapty (2016)	Metode Analisis data: Regresi Linear Berganda	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB)	• Variabel Independen menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintahan • Variabel Dependen menggunakan kualitas informasi Laporan Keuangan	• Variabel moderasi menggunakan sistem pengendalian intern • Objek dan tahun penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Ningrum (2018)	Metode Analisis data: Regresi Linear Berganda	Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Kebumen	• Variabel Independen menggunakan pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem pengendalian intern • Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah	Objek penelitian dan Tahun penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan *review* penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat dan merupakan uraian sementara dari permasalahan yang perlu dilakukan pengujian kembali. Suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data empiris membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar, begitu juga sebaliknya.

- H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPK Kota Banda Aceh secara simultan.
- H₂ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPK Kota Banda Aceh secara parsial
- H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPK Kota Banda Aceh secara parsial
- H₄ : Sistem Pengendalian Intern, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPK Kota Banda Aceh secara parsial.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian diuraikan sebagai berikut:

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh secara parsial/simultan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang pengujiannya menggunakan uji regresi linear berganda.

3) Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah one shot, yaitu horizon waktu yang mengumpulkan data penelitian hanya dalam sekali kumpul.

4) Unit Analisis

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode survei kuesioner pada Kasubbag Keuangan dan Bendahara di SKPK Kota Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Erlina, 2007:73). Adapun Populasi dalam Penelitian ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang ada di Kota Banda Aceh yang bertugas mengelola laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Kepala Sub bagian keuangan dan Bendahara penatausahaan keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh yang berjumlah 44 SKPK yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRK, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Meuraxa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 21 Dinas, 5 Badan, dan 9 Kecamatan.

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Erlina dan Sri Mulyani, 2007: 74). Teknik pengambilan yang digunakan adalah Sampling Jenuh. Menurut Sugiyono (201:156) Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian ini berjumlah 88 orang Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Bendahara Penatausahaan Keuangan pada kantor SKPK di Kota Banda Aceh.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Nama SKPK	Sampel		Jumlah Sampel
		Kasubbag Keuangan	Bendahara	
1.	Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	1	1	2
2.	Inspektorat Kota Banda Aceh	1	1	2
3.	Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	1	1	2
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1	1	2
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh	1	1	2
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	1	1	2
7.	Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	1	1	2
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	1	1	2
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh	1	1	2
10.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh	1	1	2
11.	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	1	1	2
12.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	1	1	2
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Banda Aceh	1	1	2
14.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh	1	1	2
15.	Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1	1	2
16.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh	1	1	2
17.	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	1	1	2
18.	Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh	1	1	2
19.	Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh	1	1	2
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	1	1	2
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh	1	1	2
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh	1	1	2
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh	1	1	2
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh	1	1	2

Lanjutan Tabel 3.1

No	Nama SKPK	Sampel		Jumlah Sampel
		Kasubbag Keuangan	Bendahara	
25.	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	1	1	2
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh	1	1	2
27.	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh	1	1	2
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh	1	1	2
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh	1	1	2
30.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	1	1	2
31.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh	1	1	2
32.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh	1	1	2
33.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh	1	1	2
34.	Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh	1	1	2
35.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh	1	1	2
36.	Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	1	1	2
37.	Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh	1	1	2
38.	Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	1	1	2
39.	Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	1	1	2
40.	Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	1	1	2
41.	Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	1	1	2
42.	Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	1	1	2
43.	Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	1	1	2
44.	Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	1	1	2
Jumlah		44	44	88

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, berupa data langsung dari pihak pertama (data primer) yang menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang nantinya akan

diperoleh dari Kasubbag Keuangan, dan Bendahara Penatausahaan Keuangan disetiap SKPK di Kota Banda Aceh.

Responden akan diberikan kuesioner yang berisi poin pertanyaan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern pemerintah, serta Kualitas Laporan Keuangan. Data yang telah terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis dengan pengujian secara statistik. Untuk mengkonversikan jawaban kuesioner menjadi data kuantitatif maka digunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur item-item pernyataan yang bersifat positif maupun negative terhadap masalah yang diteliti. Nilai kategori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.4 Definisi dan Operasionalisasi variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Penerapan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3).

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
	Dependen					
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami	• Dapat dipahami	Interval	1-5	B.1
			• Relevan	Interval	1-5	B.2-B.3
			• Dapat Dibandingkan	Interval	1-5	B.4-B.5
			• Andal	Interval	1-5	B.6-B7
	Independen					
2	Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	Standar akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Renyowijoyo, 2010:132)	• Laporan Realisasi Anggaran	Interval	1-5	C.1
			• Laporan Arus Kas	Interval	1-5	C.2
			• Catatan Atas laporan Keuangan	Interval	1-5	C.3-C.4
			• Neraca	Interval	1-5	C.5
			• Laporan Operasional	Interval	1-5	C.6
			• Laporan perubahan saldo anggaran lebih	Interval	1-5	C.7

Lanjutan Tabel 3.3

No	Variabel	Definisi variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)	Pemerintah perlu mengoptimisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Indriasari, Nahartyo, 2008).	• Komputer	Interval	1-5	D.1-D.3
			• Jaringan Internet	Interval	1-5	D.4-D.5
			• Software			D.6-D.7
4	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3)	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern	• lingkungan pengendalian;	Interval	1-5	E.1
			• penilaian risiko	Interval	1-5	E.2
			• kegiatan pengendalian	Interval	1-5	E.3-E.4
			• informasi dan komunikasi;	Interval	1-5	E.5-E.6
			• pemantauan pengendalian intern	Interval	1-5	E.7

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan SPSS.

Model regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis disusun dalam model berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Standar Akuntansi Pemerintah

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ε = Error Term

Untuk pengambilan keputusan atas suatu hipotesis, maka dilakukan pengujian-pengujian sebagai berikut:

1) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

2) Uji Statistik F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas mempengaruhi variabel dependen (Priyanto, 2014:154). Menurut Santoso (2004:120) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Ini berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Ini berarti menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3) Uji Statistik t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai masing-masing koefisien regresi dengan (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018).

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka tidak H_0 ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dari alat ukur yang digunakan (kuesioner). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *Person Product Moment* dengan bantuan aplikasi SPSS. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai korelasi atau r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} . Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut:

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid.

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha* dengan dibantu menggunakan Aplikasi SPSS. Apabila koefisien

cronbach's alpha lebih dari 0,60 maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel (Ghozali, 2001:133).

3.7 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan uraian sementara dari permasalahan yang perlu dilakukan pengujian kembali. Suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar, begitu juga sebaliknya. Adapun rancangan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hipotesis Pertama

H_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPK Kota Banda Aceh

2) Hipotesis Kedua

H_2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPK Kota Banda Aceh

3) Hipotesis Ketiga

H_3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPK Kota Banda Aceh

4) Hipotesis Keempat

H_4 : Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pembentukan SKPK Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dimana total SKPK di Kota Banda Aceh berjumlah 44 SKPK. Adapun rincian SKPK Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Daftar SKPK Kota Banda Aceh

No.	Nama SKPK
1.	Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
2.	Inspektorat Kota Banda Aceh
3.	Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
7.	Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh
10.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh
11.	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
12.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Banda Aceh
14.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh
15.	Dinas Sosial Kota Banda Aceh
16.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh
17.	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
18.	Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
19.	Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
25.	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
27.	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

Lanjutan Tabel 4.1

No	Nama SKPK
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh
30.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
31.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
32.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh
33.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh
34.	Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
35.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh
36.	Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
37.	Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh
38.	Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
39.	Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
40.	Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
41.	Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
42.	Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
43.	Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
44.	Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kota Banda Aceh haruslah memiliki sumber daya manusia, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat mendorong serta mendukung terhadap pencapaian kinerja. ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 4.129 orang (LkjIP Pemerintah Kota Banda Aceh, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan pada ke-44 Kantor SKPK di Kota Banda Aceh yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Banda Aceh. Dari ke-44 kantor SKPK Kota Banda Aceh, dipilih Aparatur Negeri Sipil yang memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan

dan pertanggungjawaban keuangan yaitu Kasubbag Keuangan dan Bendahara penatausahaan keuangan.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Penyajian data mengenai karakteristik responden dilakukan untuk memberikan gambaran tentang identitas dari responden. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi sampel penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, jabatan, jenjang pendidikan dan lama bekerja. Hasil rekapitulasi karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin			
1	Pria	25	28,41
2	Wanita	63	71,59
Total		88	100
Jabatan			
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	44	50,00
2	Bendahara	44	50,00
Total		88	100
Pendidikan			
1	SMA	0	0
2	D3	10	11,36
3	S-1/D4	68	77,28
4	S-2	10	11,36
Total		88	100
Lama Bekerja			
1	< 1 Tahun	0	0
2	1 – 5 Tahun	2	2,27
3	5 – 10 Tahun	0	0
4	> 10 Tahun	86	97,73
Total		88	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 88 responden, yang berjenis kelamin pria (28,41%) dan Perempuan (71,59%). Responden tersebut terbagi atas 2 (dua) jabatan yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan (50%), dan Bendahara (50%).

Selanjutnya, berdasarkan jenjang Pendidikan responden yang memiliki pendidikan terakhir D-3 sebanyak 10 orang (11,36%), responden yang memiliki pendidikan terakhir S-1/D4 sebanyak 68 orang (77,28%), dan responden yang memiliki pendidikan terakhir S-2 sebanyak 10 orang (11,36%).

Sedangkan bila dilihat dari masa kerja, responden yang sudah bekerja 1 sampai 5 tahun sebanyak 2 orang (2,27%), dan responden yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 86 orang (97,73%).

4.2.2 Hasil Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil deskripsi variabel penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penelitian ini dapat diuraikan tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Gambaran Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Uraian	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.	0	0	0	0	0	0	43	49	45	51	4,51
2	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan Arus Kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan	0	0	0	0	3	3	45	51	40	45	4,42

	menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lanjutan Tabel 4.3

No	Uraian	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
3	Saya selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.	0	0	0	0	3	3	44	50	41	47	4,43
4	Saya selalu menyajikan informasi dengan lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan setiap periode pelaporan.	0	0	0	0	3	3	38	43	47	53	4,50
5	Saya selalu mengkoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP	0	0	0	0	2	2	45	51	41	47	4,44
6	Pada instansi tempat saya bekerja, telah dibuat laporan operasional (LO) yang mencakup pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa	0	0	0	0	0	0	30	34	58	66	4,66
7	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	0	0	0	0	2	2	45	51	41	47	4,44
Rata-Rata												4,49

Sumber: Hasil Pemngolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dijelaskan bahwa responden pada SKPK Kota Banda Aceh memperoleh skor variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dengan nilai rata-rata sebesar 4,49 atau mendekati 5 (skor untuk jawaban Sangat Setuju). Kondisi tersebut menandakan bahwa sebagian responden sangat paham dan sudah melakukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan didalam penyusunan Laporan Keuangan.

2. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penelitian ini dapat diuraikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Gambaran Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Uraian	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Saya memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.	0	0	0	0	0	0	11	12	77	88	4,88
2	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	0	0	0	0	0	0	26	30	62	70	4,70
3	Adanya jadwal pemeliharaan komputer secara teratur.	0	0	0	0	0	0	18	20	70	80	4,80
4	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja secara Local Area Network (LAN), atau Wide Area Network (WAN).	0	0	0	0	0	0	30	34	58	66	4,66
5	Jaringan computer terpasang dan telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data informasi yang dibutuhkan.	0	0	0	0	0	0	10	11	78	89	4,89
6	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan Software Akuntansi.	0	0	0	0	0	0	10	11	78	89	4,89
7	Laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.	0	0	0	0	3	3	36	41	49	56	4,52
Rata-Rata												4,76

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa responden pada SKPK Kota Banda Aceh memperoleh skor variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan nilai rata-rata sebesar 4,76 atau mendekati 5 (skor untuk jawaban Sangat Setuju). Kondisi tersebut menandakan bahwa SKPK Kota Banda Aceh sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sampai dengan menyusun laporan

keuangan.

3. Variabel Sistem Pengendalian Intern

Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini dapat diuraikan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Gambaran Variabel Sistem Pengendalian Intern

No	Uraian	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Pimpinan pegawai selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.	0	0	0	0	4	5	64	73	20	23	4,18
2	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.	0	0	0	0	0	0	47	53	41	47	4,47
3	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada pimpinan pegawai selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas.	0	0	0	0	0	0	49	56	39	44	4,44
4	Intansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk indentifikasi maupun pengamanan atas aset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam computer adalah transaksi yang diotorisasi	0	0	0	0	0	0	40	45	48	55	4,55
5	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.	0	0	0	0	0	0	39	44	49	56	4,56
6	Penggunaan anggaran/pemegang kas pada masing-masing pimpinan pegawai telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya.	0	0	0	0	0	0	47	53	41	47	4,47
7	Pimpinan selalu mereviu dan megevaluasi temuan yang menunjukan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.	0	0	0	0	0	0	26	30	62	70	4,70
Rata-Rata												4,48

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dijelaskan bahwa responden pada SKPK Kota Banda Aceh memperoleh skor variabel Sistem Pengendalian Intern dengan nilai rata-rata sebesar 4,48 atau mendekati 5 (skor untuk jawaban Sangat Setuju). Kondisi tersebut menandakan bahwa SKPK Kota Banda Aceh sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel penelitian Kualitas Laporan Keuangan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Gambaran Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Uraian	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	0	0	0	0	0	0	25	28	63	72	4,72
2	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.	0	0	0	0	8	9	45	51	35	40	4,31
3	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback value</i>).	0	0	0	0	0	0	41	47	47	53	4,53
4	Informasi termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	0	0	0	0	0	0	52	59	36	41	4,41
5	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi	0	0	0	0	4	5	49	56	35	40	4,35

	yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.											
6	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya	0	0	0	0	10	11	59	67	19	22	4,10
7	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	0	0	0	0	0	0	30	34	58	66	4,66
Rata-Rata												4,44

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dijelaskan bahwa responden pada SKPK Kota Banda Aceh memperoleh skor variabel Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai rata-rata sebesar 4,44 atau mendekati 5 (skor untuk jawaban Sangat Setuju). Kondisi tersebut menandakan bahwa SKPK Kota Banda Aceh sudah dapat memahami, dan mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Nilai r hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pernyataan di setiap variabel yang telah dianalisis dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) dan iutputnya disebut *corrected item correlation*. untuk mendapatkan r tabel dilakukan dengan tabel r *product moment*, yaitu dengan menentukan $\alpha = 0,05$ kemudian n (sampel) = 58 maka df ($58-2$) = 56 sehingga didapat nilai r tabel dua sisi sebesar 0,209. Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner penelitian dapat ditentukan, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ = Valid

dan $r_{hitung} < r_{tabel}$ = Tidak Valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan X1	Indikator 1	0,583	0,209	Valid
	Indikator 2	0,387		
	Indikator 3	0,802		
	Indikator 4	0,801		
	Indikator 5	0,786		
	Indikator 6	0,546		
	Indikator 7	0,786		

Lanjutan Tabel 4.7

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Teknologi Informasi X2	Indikator 1	0,854	0,209	Valid
	Indikator 2	0,777		
	Indikator 3	0,781		
	Indikator 4	0,751		
	Indikator 5	0,868		
	Indikator 6	0,868		
	Indikator 7	0,604		
Sistem Pengendalian Intern X3	Indikator 1	0,664	0,209	Valid
	Indikator 2	0,701		
	Indikator 3	0,390		
	Indikator 4	0,777		
	Indikator 5	0,785		
	Indikator 6	0,701		
	Indikator 7	0,617		
Sistem Pengendalian Intern X3	Indikator 1	0,664	0,209	Valid
	Indikator 2	0,701		
	Indikator 3	0,390		
	Indikator 4	0,777		
	Indikator 5	0,785		
	Indikator 6	0,701		
	Indikator 7	0,617		
Kualitas Laporan Keuangan Y	Indikator 1	0,590	0,2072	Valid
	Indikator 2	0,890		
	Indikator 3	0,462		
	Indikator 4	0,757		
	Indikator 5	0,735		
	Indikator 6	0,579		
	Indikator 7	0,652		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji validitas memperlihatkan nilai r hitung setiap indikator variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan lebih besar dibandingkan nilai r tabel, dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh masing-masing variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha* dengan dibantu menggunakan Aplikasi SPSS. Apabila koefisien *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel (Ghozali, 2001:133). Secara keseluruhan hasil uji reliabilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan X1	0,798	0,60	Reliabel
Teknologi Informasi X2	0,871	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern X3	0,787	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Y	0,796	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Nilai *cronbach's alpha* pada semua variabel adalah lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel tekanan waktu, tingkat materialitas, risiko audit dan penghentian prematur atas prosedur audit, semua dinyatakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan sebagai alat ukuran variabel.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel Independen terhadap variabel Dependen, maka dilakukan analisis dengan menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan Aplikasi SPSS. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
(Constant)	4.719	5.275		.895	.374	
1 Standar Akuntansi Pemerintahan X1	.268	.100	.272	2.680	.009	.867
Teknologi Informasi X2	.250	.107	.222	2.338	.022	.994
Sistem Pengendalian Intern X3	.307	.111	.282	2.775	.007	.863

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Dari tabel 4.9 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,719 + 0,268X_1 + 0,250 X_2 + 0,307X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi linear tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian ini nilai konstanta sebesar 4,719 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Teknologi Informasi (X2) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) dianggap konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan sebesar 4,719.
2. Koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), sebesar 0,268 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap Standar Akuntansi Pemerintahan mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,268 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) sebesar 0,250 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap Pemanfaatan Teknologi Informasi mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,250 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) sebesar 0,307 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap Pemanfaatan Teknologi Informasi mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,307 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.4.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui diterima atau ditolaknyanya hipotesis alternatif yang telah dibuat, analisis dilakukan dengan menggunakan

analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 21.0 for Windows, dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%.

1. Uji Koefisien Determinasi R²

Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dengan nilai R² dari hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 ^a	.250	.224	2.1962

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan bahwa 22,4% variasi dari Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel tekanan waktu, tingkat materialitas dan risiko audit. Sedangkan sisanya sebesar 77,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

2. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji statistik F yang digunakan untuk menentukan semua variabel independen apakah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) secara simultan apakah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

Keuangan (Y). Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	135.292	3	45.097	9.350	.000 ^b
Residual	405.152	84	4.823		
Total	540.443	87			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Hasil uji signifikan F menunjukkan hasil yang signifikan, F hitung sebesar $9,350 > F_{\text{tabel}}$ sebesar 2,713 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya H_1 diterima. Hasil tersebut berarti variabel independen Standar Akuntansi Pemerintahan, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga t hitung setiap variabel atau membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila harga t hitung signifikan atau berada di atas t tabel, maka H_a diterima dan sebaliknya jika t hitung tidak signifikan dan berada di bawah nilai t tabel, maka H_a ditolak. Hasil analisis uji T dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Signifikansi t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.719	5.275	.895	.374
	X1	.268	.100	.272	.009
	X2	.250	.107	.222	.022
	X3	.307	.111	.282	.007

a. Dependent Variable : Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

1) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji t antara variabel Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.8 di atas, dimana nilai t hitung Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan keuangan sebesar 2,680 dengan signifikansi 0,009. Sementara itu, untuk t tabel dengan sig $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $88-4 = 84$, maka didapati t tabel sebesar 1,988. Hasil analisa tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan diterimanya H1 yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2) Pengaruh Teknologi Informasi secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji t antara variabel Teknologi Informasi terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.8 di atas,

dimana nilai t hitung Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan keuangan sebesar 2,338 dengan signifikansi 0,022. Sementara itu, untuk t tabel dengan $\text{sig } \alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $88-4 = 84$, maka didapati t tabel sebesar 1,988. Hasil analisa tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan diterimanya H_2 yang menyatakan bahwa Penerapan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji t antara variabel Sistem pengendalian Intern terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.8 di atas, dimana nilai t hitung Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan sebesar 2,775 dengan signifikansi 0,007. Sementara itu, untuk t tabel dengan $\text{sig } \alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $88-4 = 84$, maka didapati t tabel sebesar 1,988. Hasil analisa tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan diterimanya H_3 yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Secara Simultan terhadap Kualitaas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil uji signifikansi F menunjukkan menunjukkan hasil yang signifikan, F hitung sebesar 9,350 > F tabel sebesar 2,713, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya H_1 diterima. Hal ini juga dibuktikan dengan *Adjusted R²* sebesar 0,224 yang menunjukkan bahwa 22,4% Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPK Kota Banda Aceh. Dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan kualitas laporan keuangan jika ketiga variabel independent tersebut meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

4.5.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji regresi hipotesis, dinyatakan bahwa ada pengaruh positif antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,680 lebih besar dari t tabel sebesar 1,988 dengan signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05.

Hasil tersebut membuktikan secara parsial Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan menunjukkan H2 diterima. Arah koefisien positif menunjukkan Kualitas Laporan Keuangan akan semakin baik apabila Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Sari, dkk (2014), yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.5.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji regresi hipotesis, dinyatakan bahwa ada pengaruh positif antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t antara Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,338 lebih besar dari t tabel sebesar 1,998 dengan signifikansi 0,022.

Hasil tersebut membuktikan secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, serta menunjukkan bahwa H3 diterima. Arah koefisien

positif menunjukkan Kualitas Laporan Keuangan akan semakin baik apabila Teknologi Informasi semakin dimanfaatkan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji regresi hipotesis, dinyatakan bahwa ada pengaruh positif antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 2,775 lebih besar dari t tabel sebesar 1,998 dengan signifikansi 0,007.

Hasil tersebut membuktikan secara parsial Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, serta menunjukkan bahwa H4 diterima. Arah koefisien positif menunjukkan Kualitas Laporan Keuangan akan semakin baik apabila Sistem Pengendalian Intern semakin diterapkan.

Dalam Penerapannya, Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP dapat diawali

dengan pembangunan falsafah manajemen risiko (lingkungan pengendalian dalam arti sempit), penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, identifikasi dan penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pembangunan mekanisme informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan melaporkan risiko aktual dan biaya yang ditimbulkan, monitoring, dan pengembangan lingkungan pengendalian dalam arti luas (inspektorat.kulonprogokab.go.id).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Untary dan Ardiyanto, (2015) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Penelitian yang telah dilaksanakan berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern, mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini, tentunya memiliki implikasi dalam bidang akuntansi terkhusus pada akuntansi sektor publik dan juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja keuangan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan dapat menjadi masukan tambahan bagi pemerintah daerah didalam memperoleh opini WTP dari Badan Periksa Keuangan (BPK) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya di masa mendatang agar dapat memperluas atau menambah sampel penelitian guna mengembangkan penelitian ini.

2. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel kualitas laporan keuangan seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengalaman kerja dan Peran Auditor Internal. Hal ini dimaksudkan agar variasi naik turunnya kualitas laporan keuangan dapat lebih dijelaskan.
3. Peneliti berikutnya diharapkan dapat mendampingi responden pada saat pengisian kuesioner agar responden bisa mengisi kuesioner secara tepat dan benar.
4. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan metode pengumpulan data tidak hanya bersumber dari kuesioner, tetapi dapat dilengkapi dengan observasi atau wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.
5. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang menjadi subjek dalam penelitian ini agar lebih memperhatikan aspek penerapan standar akuntansi pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern dengan baik dan benar, maka dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy. 2009. Akuntansi Pemerintahan :Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Buku 1, Edisi 2. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Erlina dan Sri Mulyani.2007. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, 2012.AkuntansiSektorPublik. SalembaEmpat, Jakarta.
- <https://aceh.antaranews.com/berita/341331/kronologi-kasus-dugaan-korupsi-kadis-pupr-banda-aceh-di-proyek-lahan-zikir?page=all>
- <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1743/upaya-mengoptimalkan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-spip>
- Inapty, M. Ali Fikri Biana Adha, dan RR. Sri Pancawati Martiningsih, 2016. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”, Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 9 (1).
- Indriasih, D. 2014. “*The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. Research Journal of Finance and Accounting*”.Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847
- Ningrum, K.K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Nurillah, As Syifa. 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Tekhnologi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)”. *Skripsi*.Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- _____. *Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi*

Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. *Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. *Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. *Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh*

Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Edisi

Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Yogyakarta.

Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana, 2014.” Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)”, *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Volume 2 No. 1.

Staubus, 2000 dan dalam Endang, 2011. (2000). *Pihak Yang Berkepeningan Dalam Arti Para Pengguna Atau Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Sudiarianti, Ulupui dan Budiasih. 2015. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Tesis*. Universitas Udayana.

_____. *Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. *Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Untary, dan Ardiyanto. 2015. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

www.bpk.go.id Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022, Pemeriksaan Laporan Keuangan. Diunduh tanggal 5 Desember 2023.

Yosefrinaldi. 2013. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemaafaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.